

# Desain dan Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang Aman, Bermutu, dan Bergizi



Deputi Bidang Pengawasan Keamanan  
Pangan dan Bahan Berbahaya  
**Badan POM RI**

2012



## DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN .....	1
B. TUJUAN AKSI NASIONAL PJAS.....	3
C. SASARAN DAN TARGET AKSI NASIONAL PJAS.....	3
D. DEFINISI OPERASIONAL.....	4
E. DESAIN MANAJEMEN KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI PUSAT (BADAN POM) ..	5
F. DESAIN MANAJEMEN KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI DAERAH (BALAI BESAR/ BALAI POM).....	8
G. PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI DAERAH .....	10
H. MONITORING DAN EVALUASI AKSI NASIONAL PJAS 2012.....	11
LAMPIRAN .....	13

## A. PENDAHULUAN

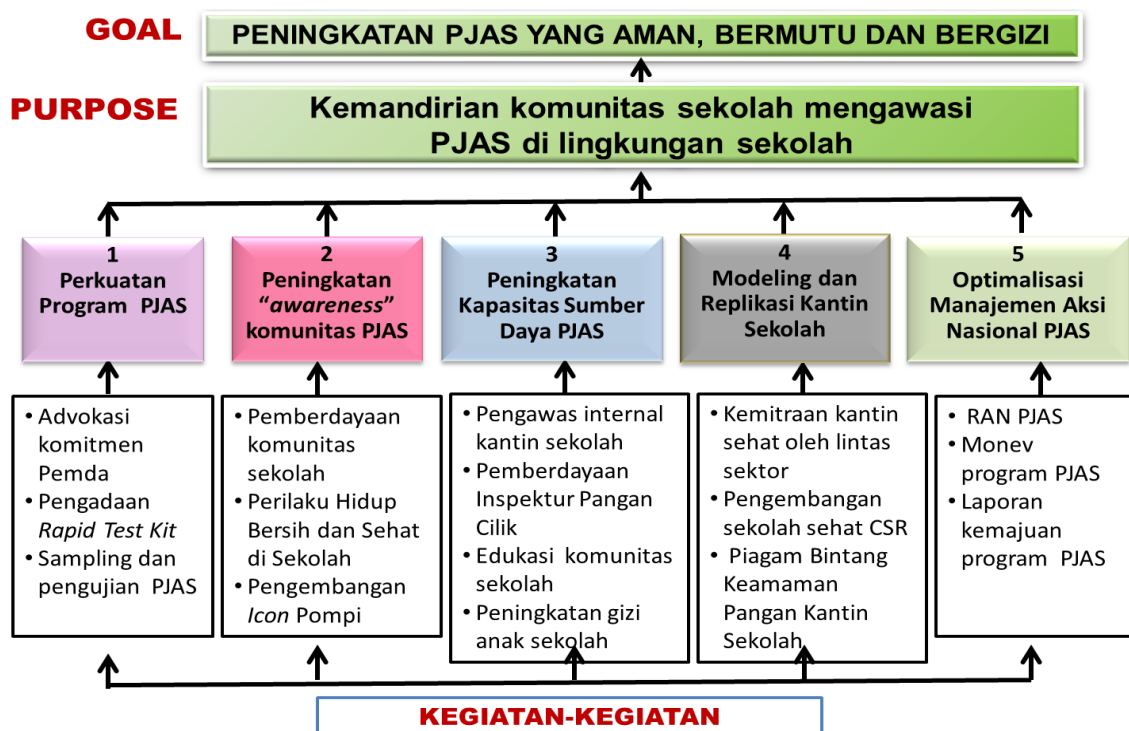
Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. Pada umumnya, anak sekolah memperoleh PJAS dari kantin yang ada di sekolahnya maupun penjaja PJAS keliling di sekitar lingkungan sekolah. Bahaya (mikro)biologi, kimia, maupun fisik sangat mungkin mencemari PJAS yang dijual di kantin sekolah dan oleh pedagang keliling karena praktek keamanan pangan yang buruk maupun lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi konsumennya tetap terjamin.

Program pengawasan PJAS secara khusus telah diinisiasi Badan POM sejak tahun 2004. Program tersebut terdiri dari surveilans keamanan PJAS dan pembinaan komunitas sekolah untuk pengawasan keamanan PJAS di lingkungannya. Saat ini, pengawasan PJAS masih terfokus pada penyalahgunaan bahan berbahaya dan penambahan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Ke depannya, pengawasan bahaya (mikro)biologis pada PJAS juga perlu dilakukan mengingat praktek yang baik saat mengolah, menjual, dan memilih PJAS belum diterapkan secara konsisten. Selain itu, sumber daya dan dana yang terbatas serta wilayah yang luas menjadi tantangan utama dalam pengawasan PJAS sehingga cakupan pengawasan oleh Badan POM masih terbatas.

Kerjasama yang terarah dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan keamanan PJAS dimulai pada tahun 2009. Kementerian Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Badan POM dan SEAFast Center IPB melaksanakan pembinaan kantin sehat dengan pemberian *block grant* dan bimbingan teknis keamanan pangan kepada 653 sekolah di 53 kabupaten/ kota di Indonesia selama kurun waktu 2009-2011. Jumlah sekolah yang telah dibina ini memang hanya sekitar 0.37% dari seluruh sekolah dasar (SD) di Indonesia ( $\pm$  178 ribu SD). Namun demikian, program ini perlu diapresiasi karena menjadi salah satu penggerak untuk pengembangan kegiatan keamanan PJAS yang lebih luas cakupannya, terstruktur, terukur, berkesinambungan, dan terpadu di mana lintas sektor lain dapat berkontribusi lebih aktif dan nyata.

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Beberapa strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai peningkatan keamanan, mutu dan gizi PJAS dapat dilihat pada Gambar 1. Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang ingin dicapai melalui aksi nasional ini adalah persentase PJAS yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pada tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 masing-masing 70, 80 dan 90%.



**Gambar 1. Strategi Aksi Nasional Pangan Jajanan yang Aman, Bermutu dan Bergizi**

Aksi Nasional PJAS adalah kegiatan bersama yang diimplementasikan dalam kerangka Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) oleh kelompok kerja yang tergabung dalam Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). Badan POM sebagai ketua tim pelaksana JKPN berperan aktif mengembangkan *grand design* kegiatan Aksi Nasional PJAS tahun 2012 yang komprehensif dengan memperhatikan capaian kegiatan Aksi Nasional pada tahun 2011 yang lalu. Desain ini difokuskan pada optimalisasi manajemen Aksi Nasional PJAS sebagai salah satu strategi kunci mencapai tujuan Aksi Nasional, termasuk penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan rutin yang bertujuan menjamin keberlangsungan dan kesinambungan Aksi Nasional PJAS.

Secara khusus, implementasi Aksi Nasional PJAS oleh Badan POM terdiri dari berbagai kegiatan yang dikoordinir oleh Direktorat di Kedeputan Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang melibatkan peran serta aktif Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia serta partisipasi komunitas sekolah. Desain manajemen

Aksi Nasional di pusat dan daerah yang komprehensif dan terpadu, pedoman kerja dan petunjuk teknis yang jelas, serta pengaturan waktu dan sumber daya yang baik merupakan elemen penting untuk memperoleh hasil kerja yang dapat memenuhi target capaian indikator Aksi Nasional PJAS.

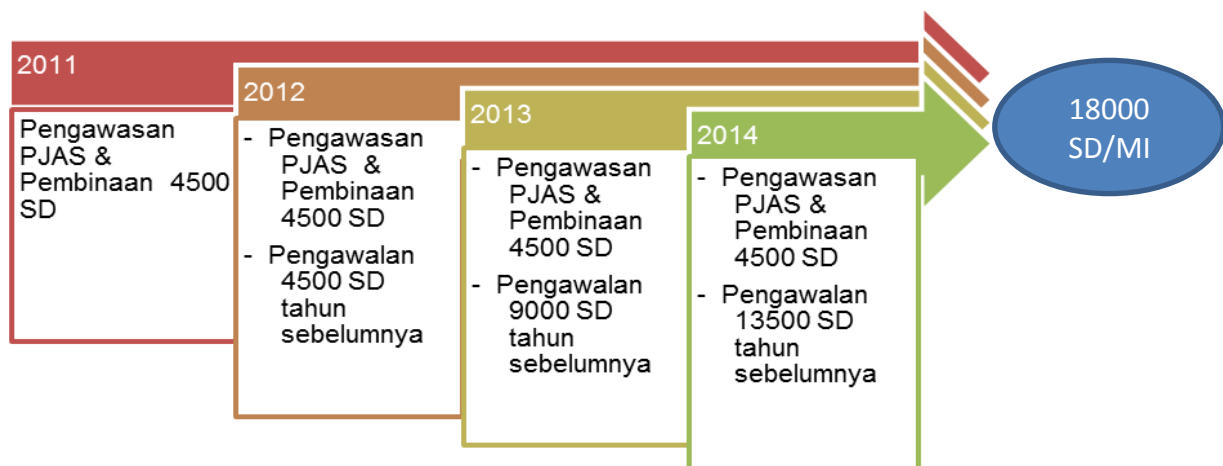
## B. TUJUAN AKSI NASIONAL PJAS

Tujuan Aksi Nasional PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi adalah:

1. Pemberdayaan komunitas sekolah untuk menjaga keamanan, mutu, dan gizi PJAS
2. Penguatan koordinasi dan jejaring kerja lintas sektor di pusat dan daerah untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi
3. Meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS di Indonesia.

## C. SASARAN DAN TARGET AKSI NASIONAL PJAS

Sasaran Aksi Nasional PJAS adalah komunitas Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di 33 propinsi. Target Aksi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan POM dan lintas sektor terkait dalam kurun waktu empat tahun (2011 - 2014) adalah 10% dari jumlah total SD/MI seluruh Indonesia. Jumlah SD/ MI yang terdata oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah 178.369 SD/MI, sehingga Aksi Nasional PJAS diharapkan dapat melibatkan sekurangnya 18.000 SD/MI selama empat tahun atau sekitar 4.500 SD/MI per tahun. Jenis kegiatan dan target cakupan SD/MI dalam kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Target SD/MI pada kegiatan Aksi Nasional PJAS 2011-2014**

Secara lebih khusus, Balai Besar/ Balai POM di 17 provinsi; yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua; menyanggupi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan PJAS terhadap 200 SD/MI di wilayah kerjanya masing-masing sedangkan target di 16 provinsi lainnya; yaitu Aceh, Bengkulu, Lampung, Bangka-Belitung, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat; adalah 100 SD/MI per provinsi.

SD/MI yang menjadi sasaran kegiatan Aksi Nasional PJAS sedapat mungkin mewakili kriteria kualitas sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kriteria yang dapat digunakan adalah status akreditasi SD/ MI, yaitu akreditasi A, B, C, dan tidak terakreditasi (TT). SD/MI terpilih di setiap provinsi hendaknya mewakili setiap status akreditasi serta ditentukan secara proporsional dengan sebaran lokasi SD/MI yang merata di wilayah kerja Balai Besar/ Balai POM. Informasi mengenai status akreditasi SD/ MI di setiap provinsi dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan setempat atau situs [www.ban-sm.or.id](http://www.ban-sm.or.id).

#### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional yang digunakan pada kegiatan Aksi Nasional PJAS meliputi jenis pangan (PJAS dan pangan siap saji) serta definisi kegiatan intervensi. Definisi jenis pangan adalah:

1. Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) adalah pangan siap saji yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah
2. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan

Sedangkan definisi kegiatan intervensi sebagaimana tercantum pada Gambar 2; yaitu pengawasan, pembinaan, dan pengawalan; adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah kegiatan sampling dan analisis sampel PJAS dari kantin dan penjaja di lingkungan sekolah
2. Pembinaan adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) keamanan PJAS
3. Pengawalan adalah kegiatan pendataan kegiatan terkait keamanan pangan di sekolah yang telah mendapat intervensi pada tahun sebelumnya

## E. DESAIN MANAJEMEN KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI PUSAT (BADAN POM)

Pada prinsipnya, peranan Badan POM dalam kegiatan Aksi Nasional PJAS adalah sebagai berikut:

1. *Leading sector* Aksi Nasional PJAS tingkat pusat
2. Penyusunan pedoman dan *masterplan* nasional untuk implementasi Aksi Nasional PJAS
3. Pelaksana kegiatan Aksi Nasional PJAS tingkat nasional
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Aksi Nasional PJAS

Kegiatan Aksi Nasional PJAS tahun 2012 di Badan POM telah diusulkan oleh empat Direktorat di Kedeputan 3 yang meliputi 24 kegiatan seperti dirinci pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kegiatan Aksi Nasional PJAS 2012 yang Dikoordinir oleh Badan POM**

No	Direktorat/Kegiatan	Penanggung jawab teknis
<b>A</b>	<b>Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (Dit. SPKP)</b>	<b>Ruki Fanaike</b>
1	Diseminasi Manajemen Aksi Nasional PJAS tingkat Pusat	
2	Diseminasi Teknis Pengelolaan Aksi Nasional PJAS (ToT Bimtek KIE Keamanan PJAS)	
3	Sosialisasi Aksi Nasional PJAS melalui FGD Lintas Sektor di tingkat Pusat	
4	Sosialisasi Aksi Nasional PJAS melalui FGD Lintas Sektor di tingkat Provinsi	
5	Bimtek KIE Keamanan PJAS di Daerah	
6	Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah	
7	Pengembangan dan distribusi materi promosi dan penyuluhan	
8	Pameran PJAS Nasional	
9	Iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keamanan PJAS	
10	Workshop Nasional	
11	Monitoring dan Pelaporan	
<b>B</b>	<b>Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan (Dit. Inspektasi Pangan)</b>	<b>Didik J Pursito</b>
12	Penyusunan Pedoman Sampling PJAS	
13	Pedoman Penetapan Prioritas Sampling PJAS	
14	Pelatihan Teknik Pengambilan Sampel PJAS	
15	Uji Petik Pengawasan PJAS di 7 Region/Wilayah	
16	Workshop Inisiasi Perkuatan Pengawasan PJAS	
17	Analisis data hasil pengawasan PJAS	



No	Direktorat/Kegiatan	Penanggung jawab teknis
18	Revitalisasi Fungsi Mobil Lab Keliling (Mobling)	
<b>C</b>	<b>Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya (Ditwas PBB)</b>	<b>Ani Rohmaniyati</b>
19	Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya (BB) pada PJAS	Indrimayatie
20	Iklan Layanan Masyarakat tentang Penyalahgunaan BB pada PJAS	Galih
<b>D</b>	<b>Direktorat Standarisasi Produk Pangan (Dit. SPP)</b>	<b>Deksa Presiana</b>
21	Penyusunan Petunjuk meminimalkan terbentuknya cemaran kimia akibat proses pengolahan pada PJAS	
22	Penyusunan Parameter Uji Cemaran pada PJAS	
23	Penyusunan Pedoman Pembacaan Standar BTP yang digunakan pada PJAS	
24	Penyusunan Pedoman Implementasi Regulasi BTP pada PJAS	

Tabel 1 menunjukkan beberapa kegiatan Aksi Nasional PJAS tahun 2012 antar Direktorat di Kedeputan 3 yang serupa dan saling terkait. Oleh karena itu, sinkronisasi substansi, penjadwalan, dan alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut harus diatur dengan baik agar realisasinya efektif, efisien, dan optimal. Secara lebih khusus, tiga Direktorat di Kedeputan 3, yaitu Dit. SPKP, Dit. Insert Pangan, dan Ditwas PBB juga mengkoordinir sejumlah kegiatan Aksi Nasional PJAS di daerah. Komunikasi yang baik antara unit terkait di Badan POM dengan Balai Besar/ Balai POM sangat penting untuk kelancaran kegiatan Aksi Nasional PJAS. Komunikasi antara petugas pusat dan daerah terutama diperlukan untuk pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan teknis kegiatan termasuk juga kelengkapan berkas administrasi kegiatan di daerah yang pendanaannya berada di daerah. Petugas pusat yang dapat dihubungi oleh petugas Balai Besar/ Balai POM untuk berkomunikasi tentang kegiatan Aksi Nasional PJAS yang pendanaannya ada di Dit. SPKP dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan petugas Dit. Insert Pangan dan Ditwas PBB yang dapat dihubungi ditunjukkan Tabel 3.

**Tabel 2. Contact person di Dit. SPKP untuk Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia**

No	Balai Besar/ Balai POM	Contact person	Nomor HP
1	Banda Aceh Medan Batam	Ruki Ita	081316678761 082125424881
2	Padang Palembang Jambi	Sarmauli Pipit	081384795436 081519514991

No	Balai Besar/ Balai POM	Contact person	Nomor HP
3	Pekanbaru Bandar Lampung Pangkalpinang	Citra Devi	08121567153 081315277722
4	DKI Jakarta Bandung Serang	Anita Lia	081317014804 087839941188
5	Semarang Jogja Palangkaraya	Yustina Cita Ratna	08568820047 081320595070 0817465945
6	Surabaya Pontianak Gorontalo	Fauzi Kamayanti Hesti	08158266887 081585384743 08888945752
7	Banjarmasin Samarinda Palu	Novinar Eva	08567808460 081802990220/02132027535
8	Denpasar Mataram Kendari	Nugroho Indra	08979779858 081328656190
9	Manado + Ternate Makassar+ Mamuju	Efriza Ima Uty	08158950519 08568016307 08567011797
10	Jayapura Ambon Manokwari Kupang	Yanti R Nur Teti	087881431028 08121472196 082122581356

Email kantor: sekretariat\_jkpn@yahoo.co.id; promosi\_keamanan\_pangan@yahoo.co.id;  
foodstarpom@yahoo.com

Telepon kantor: (021) 4259624, 42875738

**Tabel 3. *Contact person* untuk kegiatan daerah pada Dit. Insert Pangan dan Ditwas PBB**

No	Nama	Informasi kontak
<b>Dit. Insert Pangan</b>		
1	Chairun Nissa	Telp. 021-4241781
2	Didik J Pursito	Hp. 0818750515 (Chairun Nissa), 0811934350 (Didik) Email. inspeksipangan@yahoo.com
<b>Ditwas PBB</b>		
1	Ani Rochmayani	Telp. 021-4245359
2	Indrimayatie	Fax. 021-4228921 Email. standar_pbb@yahoo.com

## F. DESAIN MANAJEMEN KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI DAERAH (BALAI BESAR/ BALAI POM)

Pada prinsipnya, program Balai Besar/ Balai POM dalam Aksi Nasional PJAS adalah sebagai berikut:

1. *Leading sector* Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi
2. Pelaksana kegiatan Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi
3. Pembuatan pedoman dan *masterplan* Aksi Nasional PJAS sesuai kebutuhan spesifik lokal
4. Monitoring dan evaluasi Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi
5. Pelaporan kegiatan Aksi Nasional PJAS tingkat provinsi ke Badan POM

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kegiatan Aksi Nasional PJAS difokuskan pada pemberdayaan komunitas sekolah yang dipadukan dengan pengawasan, pembinaan, dan pengawalan keamanan PJAS di SD/ MI target. Rincian jumlah SD/MI yang menjadi sasaran Balai Besar/ Balai POM untuk melakukan intervensi dalam bentuk program pengawasan, pembinaan, dan pengawalan di masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Jumlah SD/ MI dan jenis intervensi di setiap provinsi**

No.	Provinsi	$\Sigma$ target SD/MI	Distribusi $\Sigma$ SD/MI yang diintervensi Aksi Nasional PJAS <sup>a</sup>		
			A <sup>b</sup>	B	C
1.	Sumatera Barat	200	30	50	120
2.	Sumatera Utara	200	30	50	120
3.	Sumatera Selatan	200	30	50	120
4.	Riau	200	30	50	120
5.	Lampung	200	30	50	120
6.	DKI Jakarta	200	30	50	120
7.	Jawa Barat	200	30	50	120
8.	Jawa Tengah	200	30	50	120
9.	DI Yogyakarta	200	30	50	120
10.	Jawa Timur	200	30	50	120
11.	Bali	200	30	50	120
12.	NTB	200	30	50	120
13.	Kalimantan Barat	200	30	50	120
14.	Kalimantan Selatan	200	30	50	120
15.	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	200	30	50	120
16.	Sulawesi Utara dan Maluku Utara	200	30	50	120

No.	Provinsi	$\Sigma$ target SD/MI	Distribusi $\Sigma$ SD/MI yang diintervensi Aksi Nasional PJAS <sup>a</sup>		
			A <sup>b</sup>	B	C
17.	Papua	200	30	50	120
18.	NAD	100	30	30	40
19.	Kalimantan Timur	100	30	30	40
20.	Jambi	100	15	30	55
21.	Banten	100	15	30	55
22.	Bengkulu	100	15	30	55
23.	Bangka Belitung	100	15	30	55
24.	NTT	100	15	30	55
25.	Kepulauan Riau	100	15	30	55
26.	Kalimantan Tengah	100	15	30	55
27.	Gorontalo	100	15	30	55
28.	Sulawesi Tengah	100	15	30	55
29.	Sulawesi Tenggara	100	15	30	55
30.	Maluku	100	15	30	55
31.	Papua Barat	100	15	30	55
<b>TOTAL</b>		<b>4800</b>	<b>750</b>	<b>1270</b>	<b>2780</b>

Keterangan:

<sup>a</sup> Jenis intervensi Aksi Nasional PJAS yang diberikan ke SD/MI sasaran dibedakan ke dalam lima kategori, yaitu:

A = Pengawasan PJAS

Mendapat kegiatan sampling dan analisis PJAS; Bimtek KIE keamanan PJAS (15 sekolah); KIE keamanan PJAS lainnya (misal: mendapatkan poster, leaflet, stiker, CD dan atau buku keamanan pangan); sebagai peserta untuk seleksi tingkat kabupaten/kota dalam program Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKP-KS);

B = Pembinaan level 1

Mendapat KIE keamanan PJAS lainnya (misal: roadshow petualangan POMPI, mendapatkan poster, leaflet, stiker, CD dan buku keamanan pangan) termasuk Mobil laboratorium keliling (Mobling). Sekolah menjadi prioritas untuk mendapat Bimtek Keamanan PJAS pada tahun berikutnya;

C = Pembinaan level 2

Mendapat pengiriman materi KIE (poster, leaflet, stiker, CD dan buku keamanan pangan) untuk dimanfaatkan oleh SD/MI secara mandiri

D = Pengawasan

Mendapat pengiriman materi KIE (poster, leaflet, stiker, CD dan buku keamanan pangan) dan formulir pendataan kegiatan keamanan pangan di sekolah setelah intervensi tahun 2011

E = Kategori D yang akan dilakukan oleh institusi di luar Badan POM

<sup>b</sup> Sampling PJAS tahun 2012 dilakukan di SD/MI yang mendapatkan intervensi kategori A di setiap provinsi. Balai Besar POM melakukan sampling di 30 SD/MI dan Balai POM melakukan sampling di 15 SD/MI.

Balai Besar/Balai POM perlu mengadakan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah dalam rangka pelaksanaan Aksi Nasional PJAS. Komunitas sekolah adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan PJAS di sekolah. Pemberdayaan komunitas sekolah dalam Aksi Nasional PJAS diawali dengan tim inti di sekolah, yang terdiri dari unsur komunitas sekolah, perlu dibentuk sebagai pelaksana dan *contact person* program keamanan PJAS di sekolah. Sebanyak 15 SD/MI di setiap provinsi akan membentuk tim inti sekolah ini dan menjadi peserta Bimtek Keamanan PJAS sesuai petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan yang akan dijelaskan kemudian.

Selain SD/MI yang mendapat pengawasan dan pembinaan pada Aksi Nasional PJAS 2012, SD/MI yang telah mendapat intervensi serupa pada tahun 2011 juga memerlukan pengawalan program keamanan PJAS yang diharapkan akan mereka lakukan secara mandiri pada tahun 2012 ini. Pendataan SD/MI yang telah diintervensi pada tahun 2011 dan pedoman pelaksanaan pengawalan SD/MI tersebut harus dilakukan untuk pengawalan yang terarah dan tepat sasaran.

## **G. PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) KEGIATAN AKSI NASIONAL PJAS DI DAERAH**

Sembilan juknis telah dan sedang disusun oleh unit terkait di pusat untuk pelaksanaan kegiatan Aksi Nasional PJAS di daerah. Uraian juknis yang lengkap dapat dilihat pada Lampiran. Judul kesembilan juknis tersebut adalah:

1. Lokakarya Jejaring Keamanan Pangan Daerah dalam rangka Sistem Keamanan Pangan Terpadu: Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah di Daerah
2. Sosialisasi Program Aksi Nasional PJAS melalui FGD Lintas Sektor di Tingkat Provinsi
3. Bimtek KIE Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
4. Advokasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada PJAS
5. Sampling dan pengujian PJAS (akan disampaikan oleh Dit. Insert Pangan pada Pelatihan Teknis Pengambilan Sampel PJAS bulan Februari 2012)
6. Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKP-KS)

7. Peningkatan Pengawasan dan KIE keamanan PJAS Melalui Perkuatan Mobil Keliling Balai Besar/ Balai POM
8. KIE (radio, televisi, talkshow, pameran) dalam rangka Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah di Daerah
9. Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Daerah Tahun 2012

## **H. MONITORING DAN EVALUASI AKSI NASIONAL PJAS 2012**

Seluruh kegiatan Aksi Nasional PJAS 2012 di pusat dan di daerah harus memberi sumbangsih pada tercapainya Indikator Kerja Utama (IKU) nasional yaitu 70% PJAS memenuhi memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator sekunder berupa kesesuaian hasil yang dicapai yang sesuai dengan luaran yang diharapkan dan pencapaian presentase jumlah dan luas sasaran yang dijangkau oleh program Aksi Nasional PJAS. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan Program Aksi Nasional PJAS tergantung dari beberapa asumsi yang harus terpenuhi berupa:

1. Ketersediaan sumber daya (tenaga, barang, dan dana) yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
2. Ketepatan sasaran/kegiatan/pemanfaatan oleh komunitas sekolah

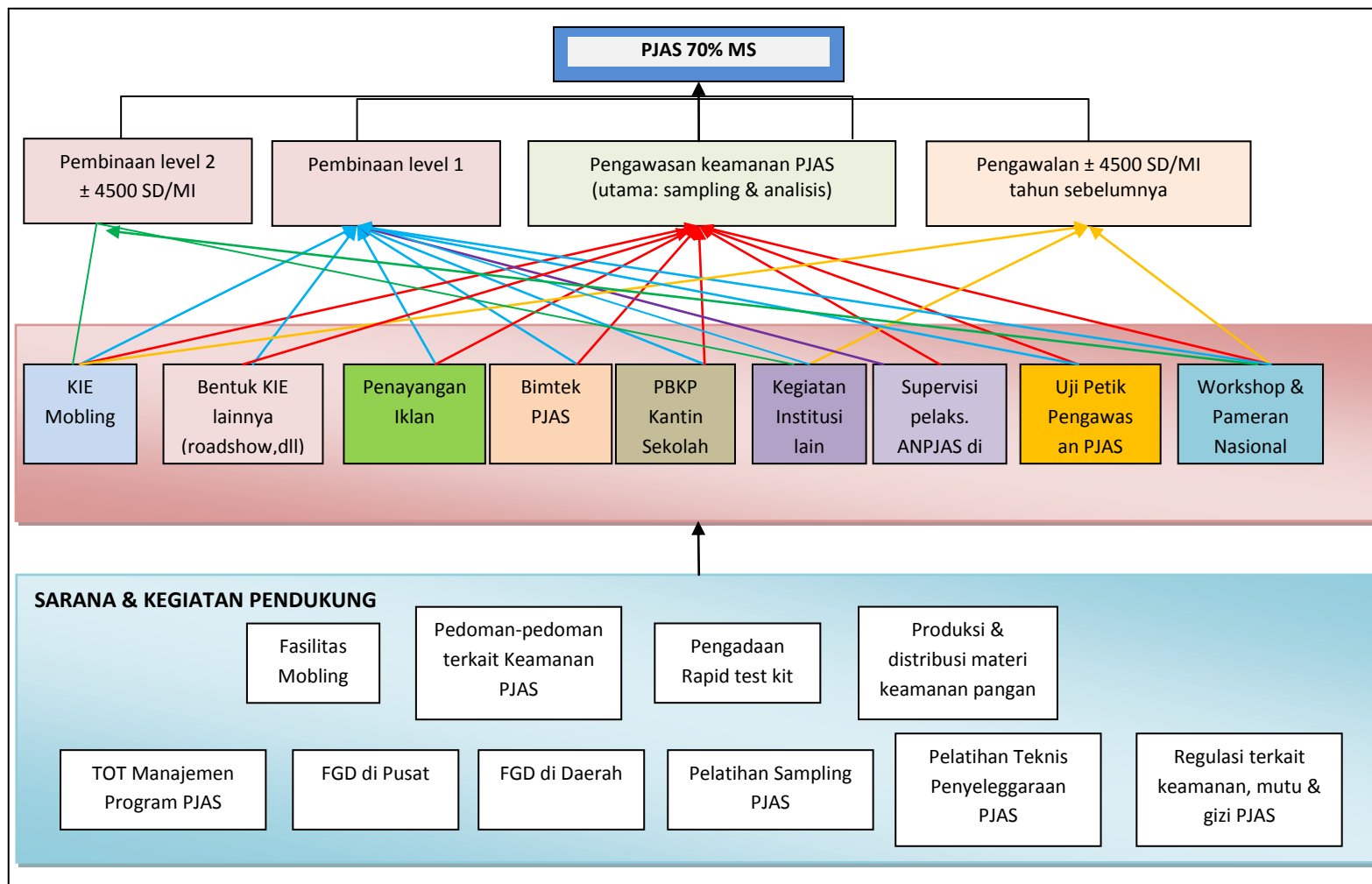
Oleh karena itu, sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Aksi Nasional PJAS di pusat dan di daerah harus disiapkan dengan baik agar terimplementasi tepat waktu. Peta pencapaian IKU dapat dilihat pada Gambar 3.

Jakarta, Januari 2012

Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Drs. Halim Nababan, MM

NIP. 19561107 197903 1 001



**Gambar 3. Peta Manajemen Pencapaian IKU Aksi Nasional PJAS 2012**

# LAMPIRAN